

**KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN PASANGAN
INDRA PUTRA DAN KOMPERENSI PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2015**

**Oleh : Syafitri Yona Sari
Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

The purpose of research are ;1) to know how political coalition make good relationship among the other parties on regency election in kuantan singingi regency 2015. 2) to know wh the coalition parties getting lost in regency election in Kuantan Singingi 2015

This research has conducted in kuantan singingi regency as long away 6 months. The method of the research was doing by qualitative. The data was using primer and secondary data. Primer data form have shape of interview and research location. While, Secondary data form are documentation and publication. The research showed;1) that first one purpose of the esearch has discribed that coalition of Indra putra- komperensi partner had been made no good relationship between individu and parties . 2) the second of purpose this research are that quick count electric showed that Mursini – Halim partner has been hight score of other partner (Indra Putra- Komperensi and Mardjan Ustha- Muslim). Quarrel of superiority of Mursini- Halim on Indra Putra quite slight is 389 voted.

Keywords: Coalition, Election, politic Parties

PENDAHULUAN

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU partai politik no.8 tahun 2012 pasal 1)

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah satu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (Miriam Budiardjo 2009:403)

Kepala Daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas fungsinya yaitu menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan. Jabatan publik mengandung pengertian bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat (Joko J.Prihatmoko, 2005:203)

Koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang bertujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai. (Lijphart, 1995:221)

Koalisi politik terjadi dalam tiga bentuk, yaitu: (1) koalisi pemilu, artinya kerja sama dimana partai-partai politik sepakat untuk tidak bersaing satu sama lain dengan tujuan memaksimalkan keterwakilan gabungan mereka, (2) Koalisi legislatif yaitu kesepakatan antara dua atau lebih partai untuk mendukung undang-undang atau program tertentu, (3) Koalisi pemerintahan yaitu koalisi formal antara dua atau lebih partai yang berujung pada pembagian kursi kabinet lintas partai. Bentuk koalisi yang terkenal adalah *grand coalition*, dimana semua partai besar bergabung dalam pemerintahan (Salvatore Simarmata, 2014:12)

Sebuah koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Pada saat para rekan (partner) bergabung dan bekerjasama hanya dengan sejumlah aktor lain, dan menghadapi aktor-aktor lain diluar mereka, setiap koalisi pada dasarnya mencari pengaruh diantara aktor-aktor tanpa adanya mediasi yang berbentuk material oleh karenanya bersifat politis.

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional dengan tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya. Hal ini lah yang menjadi alasan diperlukanya sistem rekrutmen politik. Menurut Almond dan Powel, mereka mengungkapkan bahwa partai politik mempunyai peran dalam menyeleksi orang-orang berbakat ataupun orang-orang pilihan untuk mengisi posisi-posisi tertentu dan selanjutnya memotivasi mereka untuk bekerja dalam kerangka kepentingan serta tuntutan partai politik yang bersangkutan.

Meriam Budiarjo pun mengemukakan hal yang sama, bahwa rekrutmen politik menjadi fungsi partai politik untuk mencari orang-orang mudah berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik.

Tabel 1.1 Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Pendukung Pada Pemilukada Kab.Kuantan Singingi 2015

NO	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Partai Pendukung	Jumlah Kursi di DPRD
1	Indra Putra – Komperensi	Partai Demokrat, Hanura, PAN, Nasdem	11 Kursi
2	Mursini – Halim	Gerindra, PPP, PDIP	7 Kursi
3	Mardjan Ustha – Muslim	PKB, PBB, PKPI	7 Kursi

Sumber : KPU Kuantan Singingi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasangan Indra Putra – Komperensi nomor urut 1, jumlah kursi tertinggi di DPRD yaitu sebanyak 11 kursi, Pasangan nomor urut 2 Mursini – Halim sebanyak 7 kursi dan nomor urut 3 pasangan calon Mardjan Ustha – Muslim sebanyak 7 kursi berdasarkan Pemilu tahun 2014.

Dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pasangan Indra Putra-Komperensi diusung oleh Partai Demokrat, Hanura, Pan, dan Nasdem. Sementara, Mursini-Halim di usung oleh Partai Gerindra, PPP dan PDIP. Pasangan Mardjan Ustha-Muslim

diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan PKPI.

Dalam hasil perhitungan perolehan suara yang diraih oleh masing-masing pasangan calon, Pasangan Mursini-Halim (MH) mengungguli pasangan calon Indra Putra-Komperensi (IKO) dan Mardjan Ustha-Muslim (MM). Selisih antara keunggulan Mursini-Halim atas Indra Putra-Komperensi cukup tipis sekitar 389 suara dilihat dari perolehan suara hasil pleno 15 kecamatan yang sudah tuntas dilaksanakan KPU. Pasangan Indra Putra-Komperensi mengumpulkan suara sekitar 63.195, pasangan Mursini-Halim sekitar 63.584 suara dan Mardjan Ustha-Muslim sekitar 32.941. Berikut hasil lengkap pleno rekapitulasi perhitungan suara 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Per Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Per Kecamatan		
		IKO (Indra Putra – Komperensi)	MH (Mursini – Halim)	MM (Mardjan Ustha – Muslim)
1	Kuantan Hilir Sebrang	1.569	1.014	4.239
2	Pucuk Rantau	2.259	1.401	364
3	Pangean	4.034	3.831	2.060
4	Hulu Kuantan	2.357	1.599	681
5	Kuantan Tengah	7.549	12.542	4.030

6	Singingi	6.400	6.602	2.208
7	Cerenti	3.501	3.395	555
8	Inuman	2.747	2.101	2.509
9	Logas Tanah Darat	4.812	3.962	2.055
10	Benai	3.179	4.484	1.032
11	Singingi Hilir	8.520	6.350	1.753
12	Sentajo Raya	8.079	5.689	3.490
13	Gunung Toar	1.953	4.985	795
14	Kuantan Hilir	1.180	843	5.603
15	Kuantan Mudik	5034	5.786	1.569
Jumlah		63.195 (39,52 %)	63.584 (39,88 %)	32.941 (20,60 %)

Sumber : KPU kuantan Singingi (Rekapitulasi perolehan suara per Kecamatan)

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memutuskan “**Koalisi Partai Politik Dalam Pemenangan Pasangan Indra Putra Dan Komperensi Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi**”

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana koalisi partai yang terjalin antara partai-partai pada pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. 2) Untuk mengetahui mengapa koalisi partai kalah dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten kuantan singingi selama 8 bulan yakni mulai maret –oktober 2017. metode penelitian yang dignakan adalah kualitatif yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjanging

data/informasi yang sewajarnya mengenai suatu masalah. Pengumpulan data yang diambil adalah terjun langsung ke lokasi penelitian dan informan penelitian sebanyak 8 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti berupa data wawancara dan juga data yang diperoleh dari masyarakat dilokasi penelitian, sedangkan untuk data sekunder adalah merupakan data-data yang ada dalam bentuk jadi seperti data dokumentasi dan publikasi. Teknik Analisa Data , penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisa data-data yang telah diperoleh kemudian dituangkan melalui teori-teori pendukung untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koalisi Partai Politik Pendukung Indra Putra dan Komperensi

Sebuah koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Suatu *platform* bersama menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya rekan (*partner*) lawan (*adversaries*) dan strategi. Koalisi politik tidak didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat material melainkan tujuan yang bersifat politis. Pada pemilu DPRD Kabupaten/Kota Kuantan singingi tahun 2014 dapat dilihat bahwa posisi-posisi partai dalam koalisi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Posisi Partai Koalisi IKO dalam DPRD Tahun 2014

NO	PARTAI PENGUSUNG	KURSI	
		Jumlah	%
1	Partai Nasdem	3	8,57
2	Partai Demokrat	3	8,57
3	Partai Amanat Nasional	3	8,57

4	Partai Hati Nurani Rakyat	2	5,71
TOTAL		11	31,43 %

Sumber : KPU Kuantan Singingi

Dapat dilihat tabel diatas bahwa tiga partai (Nasdem, Demokrat, PAN) di DPRD masing-masing diantaranya menduduki 3 kursi sementara Partai Hanura 2 kursi jumlah keseluruhannya 11 kursi koalisi partai mencapai 31,43% mendapati jumlah diatas 15%. Kembali kepada konteks proses partai politik yang mendukung memiliki kursi terbanyak atau mayoritas dikuansing

Pembentukan Koalisi

Sebuah Koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Suatu platform bersama menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya rekan (*partner*) lawan (*adversaries*) dan strategis.

Menurut Masdar, Sekretaris Partai Golkar kab. Kuantan Singingi mengatakan :

“ koalisi yang kami lakukan dengan beberapa partai yang cukup besar sangat membantu dalam menarik simpati masyarakat, keberhasilan suatu pemerintah itu karena adanya koalisi yg solid diantara beberapa partai”

Berdasarkan wawancara tersebut penulis melihat bahwa koalisi yang dilakukan oleh Partai pendukung IKO Merupakan strategi yang jitu dengan reputasi yang cukup besar serta memiliki suara yang cukup banyak pada pemilihan legislatif lalu, penulis daoat menganalisa dari koalisi yang dilakukan partai-partai itu, penulis menyimpulkan dari koalisi tersebut ingin dibangun suatu pemeintahan yang sangat kuat baik itu ditingkat legislatif maupun eksekutif di Kab. Kuantan Singingi. Koalisi politik tidak didasarkan pada tujuan-tujuan yang

bersifat material melainkan tujuan yang bersifat politis, Berikut ini jenis-jenis koalisi :

1. Interaksi Baik Antar Individu Maupun Kelompok

Interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi tidak mungkin akan ada kehidupan bersama. Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon antara individu dan kelompok. Alvin dan Helen Gouldner (dalam Taneko,1990:110) menjelaskan bahwa interaksi adalah aksi dan reaksi diantara orang-orang. Dengan demikian terjadinya interaksi apabila satu individu berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan reaksi dari individu lainnya.

Beberapa pendapat dari narasumber dalam hubungan interaksi antar individu maupun kelompok dari indra putra-komperensi

Berdasarkan hasil wawancara Andi Nurbai Sebagai Pengurus Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa *“ hubungan pasangan indra putra dan komperensi dengan koalisi lainnya kurang baik, tidak berjalan lancar. Dapat dilihat waktu kampanye saat pilkada kuansing, masih ada desa-desa yang belum dikunjungi untuk menyampaikan program-program kerja. Dan pada saat kampanye ke kecamatan yang jarak tempuh cukup jauh Indra putra yang lebih dikenal kota kurang memberi dana kepada tim sukses seperti minyak mobil ”.*

Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa pasangan indra- komperensi tidak hanya menjalinkan hubungan komunikasi pada kalangan masyarakat tetapi juga menjalinkan hubungan komunikasi dengan pasangan Mursini – Halim dan Mardjan- muslim serta partai koalisi lainnya masih tetap terjaga hubungan baik bahkan sebelum mencalon diri sebagai calon dan wakil calon bupati kuantan singingi. Hanya saja

Tim kampanye antara tim satu, dua maupun tiga saling menghujat di sosial media. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa pasangan indrakomperensi tidak hanya menjalinkan hubungan komunikasi pada kalangan masyarakat tetapi juga menjalinkan hubungan komunikasi dengan pasangan Mursini –Halim dan Mardjan- muslim serta partai koalisi lainnya masih tetap terjaga hubungan baik bahkan sebelum mencalon diri sebagai calon dan wakil calon bupati kuantan singingi. Hanya saja Tim kampanye antara tim satu, dua maupun tiga saling menghujat di sosial media.

2. Demokrasi Deliberatif

Kata deliberatif berasal dari kata latin *deliberatio* atau *deliberasi* (Indonesia) yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik, atau diskursus publik.

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Jika masyarakat sudah berani mengkritisi kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi masyarakat rasional, bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik atau aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Dalam hal ini peran ruang publik untuk masyarakat kuansing benar-benar diperdayakan yang mana masyarakat dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan masyarakat secara diskurtif. Ruang publik juga sarana masyarakat kuansing berkomunikasi ,berdiskusi , berargumen dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi

yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri.

Menurut tim menyatakan bahwa ruang publik memang sangat diperlukan, ini tidak hanya sebagai wadah aspirasi masyarakat tetapi juga curahan hati masyarakat kuansing kepada pemimpinnya yang nanti jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kedepannya. Menurut Masdar sekretaris Golkar menyatakan bahwa *“Saat pilkada kuansing tahun 2015 koalisi yang dilakukan tidak demokrasi deliberatif sebab calon bupati dan wakil bupati yang ditunjuk bukan perwakilan dari koalisi partai(PAN,NASDEM,HANURA,DEMOKRAT) melainkan dari partai Golkar”*.

Berdasarkan konsep ruang publik memiliki kapasitas dan fungsi amat penting dalam demokrasi politik, dikarenakan terdapat ruang untuk setiap masyarakat kuansing untuk dapat memberikan pendapat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntable. Hal ini sekali lagi menjadi gambaran penting bahwa ruang publik sebagai pengontrol dalam proses demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat kuansing dalam memberikan suara, mengawal proses perhitungan suara dan hal lainnya untuk mendukung proses pemilu serta tersedianya ruang publik bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, mengkritik dan membantu serta mengawasi pemerintah dalam mencapai program-program yang telah dibuat.

Disisi lain ada beberapa masyarakat atau pendukung dari pasangan indrakomperensi yang menyatakan kurang kesepakatan dalam pemahaman yang dibangun oleh pasangan indrakomperensi, karena sebagian mendukung merasa takut pada pemimpin yang sebelumnya

Tetapi, disisi lain banyak masyarakat yang mendukung program-program yang di buat oleh pasangan Indrakomperensi sangat sesuai dengan harapan masyarakat kuansing, seperti pelayanan masyarakat, pelayanan

kesehatan secara gratis dan telah menjadi kesepakatan bersama-sama

3. Struktur Koalisi

melalui surat nomor :059-Kpts/Dpp-Nasdem/VI/2015 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kuantan singingi yang ditanda tangani oleh ketua umum DPP partai nasdem, Surya Paloh dan Sekjen Patrice Rio Capella, tanggal 24 juni 2015 mereka menjatuhkan dukungan untuk pasangan indra putra dan komperensi sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada kuansing secara langsung untuk yang ketiga ini. Pasangan Indra putra-komperensi di dukung oleh koalisi parpol Nasdem, Hanura, PAN dan Demokrat dengan 11 kursi di DPRD. Ketua DPP partai nasdem kuansing, sukasmi sabtu mengakui jika DPP partai nasdem kuansing telah memberitahukan mereka bahwa dalam pilkada kuansing mendukung calon dari partai golkar indra putra dan komperensi .Sejak awal semua kandidat sangat optimis mendapatkan partai politik yang tergabung dalam KIH(Koalisi Indonesia Hebat) yang merupakan poros pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla yang berarti dengan dukungan partai berkuasa ini, maka kandidat semakin percaya diri untuk bergabung dalam pilkada, apalagi di kuansing mereka memiliki jumlah kursi terbanyak.

Namun, pada kenyataannya saat Pilkada Kuansing 2015 Koalisi partai indra putra dan komperensi struktur koalisi yang dibangun masih rapuh bahkan adanya perpecahan antara individu dan kelompok.

4. Cenderung Mengabaikan Struktur Formal Dari Masing-Masing Peserta Koalisi

Struktur formal dalam koalisi indra putra-komperensi dalam koalisi partai pilkada. Karena, masing-masing koalisi kurang mementing tujuan kesamaan partai yang telah di sepakati. Dan calon bupati dan wakil bupati bukan dari

koalisi partai,disamping itu kurangnya intensitas komunikasi antar para anggota baik itu dalam mendiskusikan hal tentang kebijakan atau program yang akan direalisasi untuk pilkada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koalisi yang terjadi dewasa ini, cenderung berorientasi pragmatis, terutama pada kesepakatan-kepakatan pada level partai politik saja. Situasi tersebut tidak jarang memicu ketidakpercayaan masyarakat pada dewan pemerintah yang dibentuk melalui koalisi tersebut. Dengan kata lain, koalisi politik yang terjadi tidak jarang menempatkan kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat dalam posisi yang dikotomis. Apalagi kecenderungan oligarkis partai-partai politik di Indonesia tidak jarang menjadikan partai-partai politik terlihat hanya berjuang untuk kepentingan elit-elit partainya saja.

Menyimak gambar diatas dapat nyatakan bahwa koalisi politik senantiasa terkait dengan suatu perbedaan pandangan yang tidak disetujui publik. Dalam hal ini partai politik kurang memperjuangkan suatu kepentingan atau agenda bersama. Namun, sebaliknya jika agenda bersama menjadi titik kesepakatan diantara berbagai kepentingan partai politik yang membentuk koalisi. Konsekuensi koalisi terhadap kepentingan partai adalah tidak ada satupun partai politik yang akan mendapatkan seluruh kepentingan partainya secara utuh. Anggota koalisi hanya akan mendapatkan sebagian dari kepentingannya, terutama yang sama atau terkait dengan kepentingan bersama koalisi.Oleh karena itu, dalam upaya menghadapi tantangan sekaligus mewujudkan kepentingan bersama, suatu koalisi membutuhkan suatu nilai dan prinsip dasar yang disepakati oleh semua anggota koalisi

5. Pemahaman Keuntungan Yang di dapat Tentang Koalisi

Dalam teori politik, koalisi cenderung meraih kekuasaan dari pada koalisi membentuk nilai-nilai bersama. Partai politik akan membentuk koalisi dan bekerjasama untuk meraih suara dan

dukungan dalam memenangkan posisi dewan daerah. Sebagai besar partai politik berkoalisi lebih mendominasi keinginan mereka ketimbang komitmen membangun bangsa.

Sebagai pengalaman masyarakat kuansing dalam menyerap hal ini masyarakat sudah memahami betul koalisi mana saja yang mempunyai kepentingan hal yang demikian. Namun terkadang banyak pemimpin yang dengan sikap publik yang dipimpinnya, yang muncul kemudian adalah pembelaan di atas kesalahan dan kelemahan, serta menutupinya dengan sikap pencitraan diri agar tampak santun dan berwibawa.

Dalam hal ini untuk pemahaman berkoalisi pasangan Indra Putra-Komperensi sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang politik. Cara berkoalisi dari pasangan Indra Putra-Komperensi koalisi kekeluargaan dengan melibatkan partai politik lainnya yang memiliki satu persepsi untuk membangun kabupaten kuantan singingi yang jaya. Selain itu koalisi dari pasangan indra putra-komperensi penuh dengan keakraban dan suasana kekeluargaan serta kerja sama antar parpol yang dibangun berdasarkan persamaan ideologi dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Pemahaman yang dibangun antar koalisi juga memperjuangkan isu yang sama dan dibuat suatu kesepakatan bersama sebagai haluan dari koalisi. Disamping itu koalisi dari pasangan Indra Putra-Komperensi menunjukkan intensitas komunikasi yang tinggi diantara para anggotanya. Anggota koalisi secara rutin mengadakan pertemuan demi menjaga komitmen dan ketaatan pada tujuan-tujuan koalisi.

6. Isu Yang diperjuangkan

Sesuai dengan visi-misi yang dijabarkan untuk kuantan singingi yaitu mewujudkan kabupaten kuantan singingi yang bersatu, efektif, religius, maju, adil berbudaya dan sejahtera (Kuansing Berjaya). Sebagai berikut visi misi dari

Indra Putra, ST- Komperensi, SP, Msi tahun 2016-2021

Adapun makna pernyataan visi tersebut adalah:

1. Bersatu adalah semangat persatuan dalam membangun kehidupan masyarakat, menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, serta mengedepankan kebersamaan dan kepentingan umum demi terwujudnya keselarasan dan kesenambungan jalannya pembangunan daerah

2. Efektif adalah terwujudnya pelayanan publik yang baik serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, cepat dan tanggap dalam mengatasi persoalan pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan pola pelayanan prima di pemerintahan melalui perwujudan birokrasi yang berkualitas.

3. Religius adalah terwujudnya sikap ditengah kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama mewarnai seluruh aktivitas kehidupan, sekaligus menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

4. Maju mengandung pengertian bahwa kabupaten kuantan singingi harus terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, serta terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan.

5. Adil adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang amanah, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi serta terselenggaranya pembangunan yang merata dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Berbudaya adalah terciptanya tatanan kehidupan sosial masyarakat norma bermartabat, berkarakter dan mengedepankan nilai-nilai, norma-norma sosial masyarakat serta

memperhatikan dan memiliki kearifan lokal.

7. Sejahtera adalah tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan (terpenuhi atau tercukupinya kebutuhan dasar) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi masyarakat kabupaten kuantan singingi.

7. Berfokus Pada Suatu Tujuan Atau Beragam Tujuan Dari Koalisi

Berdasarkan penjabaran dari visi misi pasangan Indra putra- Komperensi mengedepan beberapa tujuan dari program yang mereka buat untuk pembangunan Kota Kuantan singingi tahun 2016-2012. Berikut penjabaran misi yang dari pasangan indra-komperensi untuk kota kuantan singingi. Penjabaran Misi

1. “mewujudkannya kabupaten kuantan singingi yang bersatu efektif, religius, maju, adil berbudaya dan sejahtera.

Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi untuk terus menjaga kesinambungan jalannya kehidupan masyarakat yang dinamis. Kondisi aman, damai akan mendorong berkelanjutan pembangunan dan dengan sendirinya akan menciptakan tatanan kehidupan sosial yang memunculkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang berbeda akan suku, agama, ras dan golongan. Pemerintah daerah akan berupaya menjaga kestabilan kehidupan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif namun konstruktif dengan melibatkan stakeholder dan berbagai pemangku kepentingan lainnya serta aparaturnya penegak hukum untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan ketertiban umum, yakni dengan tetap memberikan kesempatan, hak dan porsi yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan pemerintah

2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengalamannya dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial

berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa

Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten singingi untuk mendorong lahirnya pemahaman yang baik terhadap pentingnya toleransi kehidupan di tengah masyarakat, misi juga mendandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi alasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Misi ini akan menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan dan program yang akan memunculkan sikap dan perilaku hidup masyarakat kuantan singingi yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Masyarakat kabupaten kuantan singingi yang bertaqwa merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan suatu perubahan dan memantapkan jalannya pembangunan dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

3. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas birokrasi, manajemen pemerintahan yang profesional dan kepemimpinan yang amanah dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, aspirasi, efektif dan efisien di kabupaten kuantan singingi.

Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas aparatur sipil negara. Upaya ini akan dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, responsibilitas, adil, efektif dan efisien serta mendorong setiap aparatur sipil negara untuk betul-betul amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Langkah utama yang akan diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan membangun birokrasi yang kuat, birokrasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga dengan

sendirinya birokrasi akan dapat menjalankan kewajiban utama yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara prima.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, cerdas sehat dan berdaya saing melalui optimalisasi program pendidikan dan kesehatan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

Misi ini merupakan upaya pemerintahan kabupaten kuantan singingi dalam melahirkan dan membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, memiliki daya saing, daya juang, dan ini akan menjadi sebuah modal sosial yang sangat besar bagi keberlanjutan pembangunan kabupaten kuantan singingi kedepannya terlebih jika dilandasi dengan akhlak yang terpuji. Dan ini akan menjadi kunci pembuka bagi keberhasilan pembangunan kuantan singingi di masa yang akan datang. Disamping itu kualitas kesehatan manusia haruslah menjadi perhatian penting, setiap komponen sumberdaya manusia, masyarakat baik penyelenggara pemerintahan maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa harmoni.

5. Meningkatkan dan mempercepat laju pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan ekonomi daerah melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta penciptaan lapangan usaha/usaha baru dan fasilitas pengembangan usaha pertanian, agribisnis, agroindustri dan jasa serta memberikan akses lebih besar bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, sektor informal dan ekonomi kreatif

Misi ini merupakan upaya besar dalam pencapaian tujuan pembangunan kabupaten kuantan singingi terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi akan tercapai melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sisi ekonomi akan tercapai melalui pertumbuhan ekonomi

stabil dan berkelanjutan serta terlaksananya pemerataan ekonomi masyarakat. Fokus utama percepatan dan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat akan tercapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan secara baik dan menyeluruh. Pembangunan ekonomi juga harus diarahkan pada penciptaan usaha dan lapangan kerja baru untuk sumberdaya manusia lokal,memperdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian, agribisnis, agroindustri dan jasa serta kebijakan dan program yang mendorong munculnya koperasi, UKM dan ekonomi kreatif ditengah masyarakat.

6. Memantapkan pembangunan perdesaan dan modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Misi ini merupakan upaya pemerintahan kabupaten kuantan singingi untuk mendorong gerak laju pembangunan yang dimulai dari desa, pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur di desa akan mempermudah aksesibilitas dan jangkauan pelayanan masyarakat akan memanfaatkan hasil pembangunan. Kapasitas aparatur desa harus di tingkatkan, gerakan dan diberdayakan. Masyarakat harus terberdayakan secara penuh, sehingga mereka dapat menikmati setiap buah dari pohon pembangunan yang telah ditanam.

8. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang dalam pembangunan daerah serta meningkatkan pembinaan pemuda, olahraga. Seni dan budaya.

Misi ini merupakan wujud peningkatan pengakuan atas kaum perempuan sebagai bagian penting dari modal pembangunan yang dimiliki, sekaligus perhatian terhadap permasalahan kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Langkah dan upaya untuk meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui peningkatan

akses disegala bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya sampai kepada standar pendidikan ditengah masyarakat. Disamping itu misi ini juga mendorong lahirnya kebijakan dan program untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, menggalakkan olahraga dan memajukan seni dan budaya masyarakat kuantan singingi.

9. Mengembangkan lingkungan kabupaten kuantan singingi yang aman, nyaman dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai adat istiadat sebagai daya ungkit pembangunan.

Misi ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kabupaten kuantan singingi untuk terus menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai dan budaya yang dimiliki. Kemajuan suatu daerah tidak akan terlepas dari upaya pelestarian budayanya.

10. Menginginkan Adanya Keterpaduan Aksi Dari Para Anggotanya

Melihat dari struktur koalisi pasangan Indra putra-komperensi terbentuk kurang baik hal ini menunjukkan bahwa partai yang berkoalisi dengan indra putra dan komperensi memiliki tidak keterpaduan bersama dalam mencapai tujuan.

Keterpaduan koalisi partai dari Indra putra dalam pelayanan masyarakat dibidang kesehatan yang mana indra putra-komperensi memiliki program untuk masyarakat kabupaten kuasing dalam pengobatan masyarakat tidak diberat biaya (gratis) dalam hal ini dinyatakan bahwa sebagian masyarakat masih menyatakan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan gratis masih sulit dan harus membayar lebih. Melihat permasalahan ini koalisi Indra putra-komperensi menginginkan dan membuat program untuk pelayanan masyarakat yang gratis bidang kesehatan dan disetiap puskesmas dilayani oleh dokter secara langsung.

Keterpaduan kerja koalisi indra putra-komperensi dalam program masyarakat adalah bidang pertanian yang menggerakkan sistem Agrobisnis sebagai faktor utama dalam membangun

pertanian berkelanjutan. Pemberdayaan petani dalam mewujudkan petani yang mandiri secara independent maupun dalam kelompok tani serta kebijakan dan program yang mendorong munculnya koperasi, UKM sebagai pegerakan perekonomian masyarakat kabupaten kuantan singingi dan ekonomi kreatif ditengah masyarakat.

Kemudian, keterpaduan koalisi partai indra putra-komperensi dalam membangun program keagamaan yang telah dijabarkan dalam visi misi untuk wujudkan pada sikap per individu yang memiliki berakhlak baik ditengah kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama mewarnai seluruh aktivitas kehidupan, sekaligus menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Koalisi politik merupakan suatu keniscayaan terutama dalam sistem multi partai. Suatu koalisi dapat terbentuk sebelum pemilihan umum ataupun setelahnya. Pada umumnya, tujuan utama suatu koalisi adalah memenangkan suatu proses pemilu dan untuk mempengaruhi proses kebijakan. Koalisi politik dapat terbentuk baik dalam sistem presindensial maupun parlementer dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namun dalam sistem apapun, partai politik tetap menjadi salah satu aktor utama baik dalam membentuk atau mempertahankan keberlanjutan koalisi. Tanpa komitmen yang kuat dari partai politik, maka suatu koalisi tidak akan terbentuk. Jikapun terbentuk, maka kondisinya akan goyah dan tidak akan berlangsung lama. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses koalisi yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala di Kuantan Singingi tahun 2015.

Penulis menyimpulkan dari jenis-jenis koalisi menurut Sukri Tamma yaitu, 1. Interaksi yang baik antar individu dan kelompok, tetapi di koalisi partai politik yang terjadi dalam pilkada kuansing tidak baik dan tidak berjalan lancar, 2. Demokrasi deliberatif, pada saat pilkada kuansing koalisi tidak demokratis deliberatif, karena perwakilan bukan dari koalisi partai melainkan dari partai Golkar, 3. Struktur koalisi pada saat pilkada rapuh, retak bahkan adanya perpecahan, 4. Cenderung mengabaikan struktur formal dari masing-masing peserta koalisi, 5. Pemahaman keuntungan yang didapat pada koalisi, 6. Isu yang diperjuangkan, dan 7. Berfokus pada suatu tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Joko, Prithatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lijphart, Arent. 1995. *Sistem Pemerintahan Perlementer dan Presidensial*. Jakarta: Raja Grafindo

Salvatore, Simarmata. 2014. *Media dan Politik*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.